

Perumusan Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Fungsi Guru di MAS Muhammadiyah 1 Medan

Muhammad Iqbal¹, Tri Fatimah², Mutiara Hasni³, Adinda Agustina⁴, Nurwinda Aulia Nasution⁵, Yuda

Mulia Ramadhan Sitepu⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Deli Serdang, Sumatera Utara
iqbalmpi08@gmail.com

Abstract

The main goal of education is the realization of national education goals, namely elevating the life of the nation and state, how students can be the best hope for graduates if teachers lack awareness and concern and a sense of responsibility. Here the director as a leader makes the right policy. the principal who is the foundation of quality education must act as a motivator, driver, pioneer and reinforcer, and administrator. In other words, the principal is the decision maker, determines the direction of the school's goals and is one of the implementers of educational policy or the heart of the school. This article aims to find out the implementation of the principal's policy in improving the function of teachers in Mas Muhammadiyah 1 Medan. This research uses descriptive qualitative method. The data collection technique used was observation, interviews and documentation by observing directly in the field. Based on the results of data analysis, it can be found that the form of implementation of the school principal's policy is very thorough and sequential in accordance with predetermined procedures, as well as a full day system program that makes the school a plus for the community who views it and for teachers who have balanced this with their respective duties and responsibilities. each effectively and efficiently.

Keywords: Policy, Teacher Function

Abstrak

Tujuan utama pendidikan adalah terwujudnya tujuan pendidikan nasional, yaitu mengangkat kehidupan bangsa dan negara, bagaimana siswa bisa menjadi harapan terbaik bagi lulusan jika guru kurang memiliki kesadaran dan kepedulian serta rasa tanggung jawab. Di sini direktur sebagai pemimpin membuat kebijakan yang tepat. kepala sekolah yang menjadi fondasi pendidikan bermutu harus berperan sebagai motivator, pendorong, pelopor dan penguat, dan administrator. Dengan kata lain, kepala sekolah merupakan pengambil keputusan, penentu arah tujuan sekolah dan merupakan salah satu pelaksana kebijakan pendidikan atau jantung dari sekolah tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan fungsi guru di Mas Muhammadiyah 1 Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan meninjau langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil analisis data dapat ditemukan bahwa bentuk implementasi kebijakan kepala sekolah sangat teliti dan berurutan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta program sistem *full day* yang membuat sekolah tersebut bernilai plus terhadap masyarakat yang memandangnya dan untuk para guru telah menyeimbangi hal tersebut dengan tupoksinya masing-masing secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kebijakan, Fungsi Guru

Copyright (c) 2023 Muhammad Iqbal, Tri Fatimah, Mutiara Hasni, Adinda Agustina, Nurwinda Aulia Nasution,
Yuda Mulia Ramadhan Sitepu

Corresponding author: Muhammad Iqbal

Email Address: iqbalmpi08@gmail.com (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kab. Deli Serdang, Sumut)

Received 05 January 2023, Accepted 12 January 2023, Published 12 January 2023

PENDAHULUAN

Kebijakan (policy) berasal dari etimologi kata Yunani, yaitu "Polis" yang berarti kota (town). Dalam hal ini, kebijakan terkait dengan gagasan penataan organisasi dan merupakan model formal yang juga diadopsi oleh pemerintah atau organisasi sehingga dengan ini mereka berjuang untuk mencapai tujuannya (Syafaruddin, 2008: 75).

Kebijakan umumnya bersifat pemecahan masalah dan proaktif. Berbeda dengan undang-undang dan peraturan, kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meski juga menyatakan "apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan". Kebijakan juga dimaksudkan untuk bersifat umum, tetapi tidak mengecualikan spesifik lokal. Kebijakan harus memberikan keleluasaan untuk ditafsirkan berdasarkan kondisi spesifik yang ada.

Kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hakikat pendidikan yaitu upaya untuk memanusiakan anak manusia dan mempersiapkan mereka menjadi generasi penerus yang cerdas, Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan bagian keempat alinea UUD 1945 (Bakry, 2010:3).

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik, yaitu keputusan atau pilihan tindakan yang diambil langsung oleh beberapa pihak (dalam hal ini pemerintah) untuk mengatur pengelolaan dan pemerataan pendidikan sumber daya alam, keuangan dan manusia untuk kepentingan umum, yaitu massa, penduduk, komunitas atau warga negara dari negara (Bakry, 2010: 1).

Langkah-langkah dari penyusunan kebijakan pendidikan dimulai dari langkah perencanaan kebijakan atau program atau konteks kebijakan yang sedang disusun, kemudian dilanjutkan ke langkah persetujuan, kemudian ke tahap implementasi atau implementasi dan ditutup dengan tahap evaluasi dan evaluasi. (Dunn, 2000:24).

Dalam dunia pendidikan, setiap negara memiliki visi, misi, dan tujuan masing-masing. Dimana kedua harapan ini akan dapat berjalan dengan baik atau bisa dibilang berhasil bila setiap pencapaiannya dilakukan sesuai dengan sistem atau kaidah pengajaran yang tepat. Yang nantinya akan mempengaruhi peserta didik yang memiliki semangat menjunjung tinggi bangsa, baik dari segi keberanian maupun kecerdasan bangsa, sehingga tercipta suatu negara yang mampu unggul dalam persaingan nasional. Oleh karena itu, gambaran keseluruhan pendidikan tidak lebih dari tanggung jawab Negara.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan berkaitan dengan seperangkat hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, termasuk item tujuan pendidikan dan cara mencapainya.

Kepala sekolah/madrasah bertugas melaksanakan fungsi kepemimpinan, baik fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar-mengajar secara efektif dan efisien. Kepala madrasah yang berhasil apabila memahami keberadaan madrasah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, dan mampu melaksanakan peranan kepala madrasah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin madrasah.

Dari sisi tenaga pendidik, kepala sekolah dituntut untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi guru. Kepala sekolah juga sebagai administrator dalam keuangan, sebagai supervisor dalam segala aspek pendidikan (8 standar pendidikan nasional) dan sebagai leader dalam lembaga pendidikan baik dari segi tugas maupun SDM. dan bukan hanya itu, kepala sekolah juga

sebagai pencipta iklim kerja yang kondusif yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, Kepala sekolah juga berperan sebagai wirausahawan, serta berperan dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu personal sekolah (tenaga pendidik dan kependidikan beserta peserta didik) dalam menghadapi permasalahan dan berperan serta mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan cara membuat aturan atau kebijakan oleh kepala sekolah (Helmawati, 2014: 29-32).

Model kebijakan merupakan suatu bentuk kebijakan yang dapat di ambil atas beberapa pertimbangan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dari pertimbangan tujuan, strategimaupun keperluan lingkungan. Adapaun model mdel kebijakan kebijakan yaitu

Model Deskriptif.

Model pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan (baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan) untuk menerangkan sesuatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat. (Ace Suryadi , H.A.R Tilaa, 1994: 46).

Model deskriptif adalah menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program, dan menyajikan informasi yang diperlukan sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan seperti meramalkan kinerja guru yang ada di sekolah sebagai bahan laporan oleh kepala sekolah.

Model Normatif

Diantara beberapa jenis model normatif yang di gunakan analisis kebijakan dalam model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum tugas kepala sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat memecahkan suatu masalah kebijakan.

Model verbal

Adalah kebijakan yang diekspresikan dalam bahasa sehari hari disini kepala sekolah membuat kebijakan adalah dengan menggunakan bahasa sehari hari yaitu dengan menggunakan ekspresi atau gaya kepemimpinan yang telah di buat tersebut

Model sebagai Pengganti dan Perspektif

Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Model pengganti mulai disadari atau tidak dari asumsi bahwa masalah formal adalah representasi yang sah dari masalah yang substantif. Sedangkan model perspektif didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak pernah sepenuhnya mewakili secara sah masalah substantif. Hal ini penting karena pemecahan masalah pendidikan ini harus dilakukan dengan tepat, jika tidak tentu akan mendapatkan kerugian baik waktu, material, dan juga penyimpangan dari tujuan yang telah ditentukan (Rusdiana, 2015: 48).

Adapun langkah-langkah kebijakan kepala sekolah sebagai berikut:

1. Formulasi, adalah perumusan atau pembuatan. Jadi, formulasi kebijakan adalah pembuatan /perumusan suatu kebijakan dalam pendidikan

2. Implementasi Kebijakan, yaitu untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut pendidikan langkah yaitu: Pertama, mengimplementasikan dalam bentuk program program pendidikan. Kedua, dapat melalui kebijakan derivat (turunan) dari kebijakan pendidikan nasional tersebut. (Yuni Indah, 2016 : 41). Agar implementasi kebijakan dalam pendidikan berjalan dengan lancar dan sukses maka perlu di analisis tentang peraturan yang dapat mendukung kebijakan, keuangan, personil dan prasarana lainnya yang dapat mendukung suatu pelaksanaan kebijakan begitu juga agar pendidikan disuatu sekolah bermutu dan berkualitas maka dengan membuat suatu peraturan yang dapat mendukung kebijakan yaitu oleh kepala sekolah dan seluruh komponen yang ada di sekolah tersebut.
3. Evaluasi Kebijakan, yaitu tidak hanya berfokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan saja, akan tetapi evaluasi kebijakan mencakup evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Disini kepala sekolah melakukan suatu pemantauan kinerja, melaksanakan pengaruh evaluasi dan melaksanakan evaluasi proses guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan tersebut telah dicapai.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin mengungkapkan mengenai permasalahan hal tersebut yang terjadi di Mas Muhammadiyah 1 Medan, sehingga dengan judul: Perumusan Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Fungsi Guru Di Mas Muhammadiyah 1 Medan

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat ke lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif lapangan bertujuan untuk meneliti dan mengetahui sejauh mana upaya kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan fungsi guru di Mas Muhammadiyah 1 Medan. Penelitian ini dilakukan secara observasi langsung dengan menitik beratkan pada peran seorang kepala sekolah dalam meningkatkan fungsi guru dan melihat kondisi peserta didik dilapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) serta perbuatan-perbuatan manusia. apabila dilihat dari segi permasalahan yang diteliti maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan situasi dan kejadian yang terjadi dan memberikan gambaran akurat dari sebuah data, menggambarkan suatu proses mekanisme, atau hubungan antar kejadian. (Sugiyono, 2018). Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat.

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif. Riset deskriptif ialah jenis riset yang berusaha menggambarkan gejala dan fenomena, baik fenomena alamiah maupun rekayasa. Tujuan riset

ini untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki sehingga menghasilkan banyak temuan-temuan penting.

Peneliti akan mengungkap upaya kebijakan kepala sekolah terhadap fungsi guru Mas Muhammadiyah 1 Medan dengan cara menjelaskan, memaparkan / menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi maka dapat diasumsikan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan.

Penyajian Data

Penyajian data pada artikel ini membahas pengolahan dan analisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Mas Muhammadiyah 1 Medan, dimana data tersebut penulis dapatkan melalui interview sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu keputusan yang objektif. Di samping itu pula penulis menggunakan metode observasi dan dokumentasi sebagai metode penunjang guna melengkapi data yang telah penulis dapatkan melalui metode dokumentasi.

Gambaran Umum Mas Muhammadiyah 1 Medan.

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Medan didirikan dan mulai dibuka pada tanggal 1 Januari 1971 yang berkedudukan di Jalan Darussalam Ps. II Kota Medan dan milik Persyarikatan Muhammadiyah yang dibina oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Pada Tahun 1971 ini Kepala Madrasah nya yaitu Drs. Moedjijono Herlambang. Pada Tahun 1990 Madrasah Aliyah Muhammadiyah pindah alamat di Jalan Mustafa No. 1 Glugur Darat Kampung Dadap Kota Medan. Pada masa kepemimpinan Bapak Ermanto, S.Ag, tahun 2002 sampai dengan sekarang MAS Muhammadiyah dipindahkan ke Jalan Mandala By Pass/Jl. Jenderal Ahmad Thahir No. 140 –A Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan satu atap dengan gedung Gedung Dakwah Muhammadiyah PDM Kota Medan.

Berikut adalah hasil wawancara terhadap kepala sekolah dalam upaya meningkatkan fungsi guru di Mas Muhammadiyah 1 Medan sebagai berikut:

“Dalam proses peninjauan kinerja maupun aktivitas para guru di Mas Muhammadiyah 1 Medan, saya selalu mengaudit untuk mengevaluasi dan mengetahui tabel grafik penilaian kinerja maupun presensi terhadap para guru, hal tersebut selaras dengan Visi, Misi sekolah Mas Muhammadiyah 1 Medan.”

Adapun visi misi MTs Raudhatul Akmal ialah :

- VISI: Mewujudkan Madrasah yang Agamis, Dinamis, Harmonis dan Populis, Sehingga terbentuk Kader Muhammadiyah yang Kuat IMTAK, Tanggap IPTEK, Unggul Prestasi dan Kompetitif di dunia Global.
- MISI:
 1. Menanamkan dan membudayakan nilai-nilai Islam serta Karakter budaya bangsa dalam pembelajaran sebagai sumber kearifan dalam bertindak
 2. Menerapkan Pembelajaran yang berwawasan Islami.

3. Menumbuhkan semangat keunggulan warga madrasah dalam berprestasi, berkarya dan berdedikasi.
4. Menciptakan Harmonisasi, kerjasama Madrasah.
5. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Profesional Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia pendidikan
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa baik akademik maupun non akademik sesuai dengan Perkembangan dan tuntutan kebutuhan zaman.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seluruh civitas akademika.
8. Meningkatkan pelayanan yang optimal bagi seluruh warga sekolah dan masyarakat, baik sarana maupun prasarana pendidikan.
9. Mampu bersaing dibidang akademik dan non-akademik pada tingkat regional, nasional maupun internasional.
10. Menghasilkan lulusan yang kompetitif di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Swasta (PTS).

Kemudian dalam bentuk proses kebijakan kepala sekolah dalam langkah meningkatkan fungsi guru adalah dengan melakukan perencanaan atau perumusan kebijakan yang di buat kemudian melakukan pengorganisasi yaitu bekerja sama agar kebijakan yang telah di buat dapat berjalan dan implementasi kebijakan kepala sekolah yaitu dengan menjalankan kebijakan yang di buat serta yang terakhir adalah melakukan evaluasi yang mana program tersebut adalah visi dan misi sekolah, program Tahfizul Al Qura'an, HW, program sistem *full day* school serta program Ektrakurikuler agar dapat meningkatkan fungsi guru dengan cara mengikutsertakan Guru dalam berbagai pelatihan, workshop dan Bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga terkait, mengikutsertakan Guru dalam pelatihan *enterpreuneur/* kewirausahaan. dalam menjalankan tupoksinya menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi di atas dapat penulis pahami bahwa kebijakan kepala sekolah sangat teliti dan berurutan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta program sistem *full day* yang membuat sekolah tersebut bernilai plus terhadap masyarakat yang memandangnya dan untuk para guru telah menyeimbangi hal tersebut dengan tupoksinya masing-masing

HASIL DAN DISKUSI

Temuan pada penelitian diarahkan pada upaya mengungkapkan temuan penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Medan yang berpedoman pada empat fokus masalah penelitian yaitu tentang manajemen Kepala Madrasah dalam meningkatkan fungsi guru di MAS Muhammadiyah 1 Medan.

Perumusan Kebijakan Kepala Sekolah dalam meningkatkan Fungsi Guru di MAS Muhammadiyah 1 Medan.

Sebagai seorang Kepala Madrasah tentunya harus memiliki berbagai kemampuan dan kelebihan untuk mengelola lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Kepala Madrasah dituntut harus mampu menjadi seseorang manajer yang dapat mengelola semua warga sekolah dengan merumuskan

kebijakan sebelum melakukan kegiatan. Untuk merumuskan kebijakan dalam meningkatkan fungsi guru tentunya memerlukan manajemen yang baik dengan menimbang dan mengevaluasi semua kegiatan yang dilakukan. Terkait bagaimana dan siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan dijelaskan Kepala Madrasah dalam wawancara sebagai berikut: *Perumusan kebijakan di MAS Muhammadiyah 1 Medan dilakukan dengan melibatkan wakil saya bagian kurikulum dengan melakukan beberapa tahapan yaitu: pertama perencanaan kebijakan dilakukan dengan proses identifikasi kebutuhan, sumber-sumber pikiran kebijakan dan penentuan tujuan kebijakan. Kedua melakukan Implementasi Kebijakan seperti melakukan langkah-langkah kongkrit untuk membekali guru-guru mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan yang dipersyaratkan. Ketiga Evaluasi kebijakan yang dilakukan untuk menilai dan mengukur efektifitas inovasi dari hasil belajar siswa dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru selama mengajar*

Keterangan di atas menjelaskan bahwa perumusan kebijakan Kepala Madrasah dalam meningkatkan fungsi guru melibatkan wakil kepala sekolah bagian kurikulum dengan melakukan beberapa tahapan yaitu: Pertama proses perencanaan kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan sumber-sumber pikiran kebijakan seperti adanya gagasan- gagasan baru yang berasal dari hasil berbagai forum seperti hasil pelatihan, seminar, dan rapat antar guru-guru serta penentuan tujuan kebijakan untuk perbaikan kualitas layanan belajar siswa. Kedua, melakukan implementasi kebijakan seperti melakukan langkah-langkah kongkrit untuk membekali guru-guru mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan yang dipersyaratkan. Ketiga evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai dan mengukur efektifitas inovasi dari hasil belajar siswa dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru selama mengajar. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara bersama wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum MAS Muhammadiyah 1 Medan (WKM 1), sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Biasanya kalau untuk perumusan kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan fungsi guru, pastinya selalu meminta saran kepada saya sebagai wakepsek kurikulum karena tupoksi saya bertanggung jawab dala permasalahan guru. Sebelum membuat perumusan kebijakan bisanya ada langkah-langkah yang kami lakukan seperti kami membuat perencanaan terlebih dahulu tentang kebijakan apa yang akan dibuat kemudian kebijakan itu dilakukan gurunya dengan harapan akan ada perubahan dari kebijakan tersebut dan setelah itu kami melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dilakukan. Tentunya semua perumusan kebijakan dimulai dengan forum diskusi, forum rapat baik itu kita rapat yang lingkupnya dalam kantor ini maupun rapat dengan guru-guru. Intinya disini semua kebijakan tidak pernah dilakukan secara otoriter.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan fungsi guru, Kepala Madrasah dan WKM 1 menyusun terlebih dahulu kebijakan yang akan dilakukan dengan membuat perencanaan, Implementasi kebijakan dan evaluasi dengan saling mendengarkan saran, pendapat dan masukan oleh semua pihak dengan bermusyawarah. Hal ini juga didukung

dengan hasil wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan MAS Muhammadiyah 1 Medan sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Untuk merumuskan kebijakan, kepala sekolah biasanya selalu melibatkan waka kurikulum dan kesiswaan didasarkan pada masalah-masalah kongkrit yang ada dan kebijakan muncul akibat adanya gagasan-gagasan baru yang berasal dari hasil-hasil berbagai forum seperti hasil penataran dan rapat antar guru-guru. Gagasan gagasan kebijakan Kepala Madrasah timbul dari penilaian dan pengamatan selama perjalanan akademik.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam perumusan kebijakan dilakukan dengan berdiskusi dan melibatkan wakil-wakilnya dengan didasarkan pada masalah-masalah kongkrit yang ada seperti masalah pembelajaran di kelas serta adanya gagasan baru yang muncul dari berbagai forum penataran, seminar dan rapat antar guru. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara bersama guru (1) MAS Muhammadiyah 1 Medan, sebagaimana hasil wawancara berikut :

Memahami bagaimana Kepala Sekolah melakukan perumusan kebijakan bapak biasanya selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan permasalahan- permasalahan yang kami hadapi didalam kelas, Bisa juga dengan mengapresiasi gagasan baru dari berbagai kegiatan guru seperti seminar, pelatihan dan rapat antar guru. Dari permasalahan itu, kepala sekolah bersama wakilnya melakukan perumusan kebijakan untuk mengatasi permasalahan dan gagasan baru yang kami sampaikan di dalam forum rapat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru 2 sebagai berikut:

Biasaya kalau untuk perumusan kebijakan Kepala Sekolah biasanya melibatkan guru-guru dalam membuat kebijakan seperti menyampaikan permasalahan kami dalam mengajar, menghadapi siswa dan kebutuhan fasilitas mengajar, ataupun kami menyampaikan gagasan atau ide kami untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru 3 dalam wawancara sebagai berikut :

Disini kalau ada hal-hal yang penting pasti selalu dirapatkan apalagi kalau untuk guru-guru biasanya hal ini dilakukan setiap awal semester yaitu memasuki awal tahun ajaran baru dengan membuat perencanaan kebijakan, membuat perubahan dan pembaharuan kinerja serta negevaluasi kegiatan belajar

Dengan demikian dari beberapa wawancara mengenai bagaimana Kepala Madrasah merumuskan kebijakan dalam meningkatkan fungsi guru di MAS Muhammadiyah 1 Medan, dilakukan dengan membuat perencanaan kebijakan yang dilakukan melalui proses berfikit dan alitis yang meliputi proses identifikasi kebutuhan kebijakan, sumber-sumber pikiran kebijakan dan penentuan tujuan kebijakan. Setelah melakukan langkah-langkah perumusan kebijakan, maka Kepala Madrasah melakukan forum rapat, diskusi dan musyawarah dengan pihak yang terkait seperti Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, kesiswaan dan para guru.

Pernyataan di atas dikuatkan dengan hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti pada hari Senin 20 Maret 2017, di mana peneliti mencantumkan daftar hadir dan notulen rapat evaluasi KBM

semester ganjil TP.2016/2017 yang dilakukan di akhir semester ganjil tepatnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017, serta pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 peneliti menemukan kegiatan rapat Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Wali Kelas.

Hasil observasi juga dilakukan peneliti pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2017, ditemukan kegiatan yang dilakukan Kepala Sekolah dengan PKS, Kurikulum, Kesiswaan dengan melakukan briefing pagi sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar Kepala Sekolah memberikan pengarahan terkait dengan kedisiplinan siswa, guru dan ketertiban sekolah dalam proses belajar mengajar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2017 Kepala Sekolah melakukan rapat bulanan evaluasi kegiatan belajar mengajar bersama guru-guru di mana Kepala Sekolah memimpin jalannya rapat.

Dari paparan wawancara dokumen dan hasil observasi di atas ditemukan bahwa Kepala SMA Muhammadiyah 2 Medan merumuskan kebijakan dengan melibatkan semua unsur manajemen baik Wakil Kepala Sekolah beserta tim dan dewan guru melalui forum rapat. Dari kegiatan rapat dengan dewan guru tentunya akan menghasilkan bentuk-bentuk perumusan kebijakan Kepala Sekolah terkait dengan peningkatan fungsi guru di SMA Muhammadiyah 2 Medan.

Hasil wawancara dengan kepala SMA Muhammadiyah 2 Medan mengenai bentuk rumusan kebijakan dalam meningkatkan fungsi guru dijelaskan sebagai berikut: "Bentuk rumusan kebijakan yang saya lakukan selaku Kepala Sekolah dilakukan melalui proses diskusi. Semua kebijakan yang selalu dilakukan selalu berdasarkan hasil diskusi kepada para wakil saya yaitu WKS Kurikulum, WKS Kesiswaan dan juga pihak yayasan. Dari diskusi itu terdapat bentuk kebijakan berupa program jangka pendek, tengah dan panjang. Salah satu KBM yang sudah dilakukan yaitu dengan pelatihan untuk guru-guru dengan mendatangkan narasumber dari UNIMED seperti pelatihan membuat perangkat pembelajaran K13, pelatihan mengatasi psikologi anak, pelatihan simulasi otak dan guru-guru diikuti sertakan dalam kegiatan workshop dan seminar pendidikan".

Keterangan di atas menjelaskan bahwa Kepala Sekolah yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Medan merumuskan kebijakan melalui musyawarah dan diskusi. Untuk meningkatkan fungsi guru, Kepala Sekolah melakukan pelatihan, dan mengikuti seminar pendidikan. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMA Muhammadiyah 2 Medan (PKS 1).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kebijakan kepala sekolah sangat teliti dan berurutan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta program sistem full day yang membuat sekolah tersebut bernilai plus terhadap masyarakat yang memandangnya dan untuk para guru telah menyeimbangi hal tersebut dengan tupoksinya masing-masing secara efektif dan efisien.

Perumusan kebijakan dilakukan dengan berdiskusi dan melibatkan wakil-wakilnya dengan didasarkan pada masalah-masalah kongkrit yang ada seperti masalah pembelajaran di kelas serta adanya gagasan baru yang muncul dari berbagai forum penataran, seminar dan rapat antar guru.

Dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan fungsi guru, Kepala Madrasah dan WKM 1 menyusun terlebih dahulu kebijakan yang akan dilakukan dengan membuat perencanaan, Implementasi kebijakan dan evaluasi dengan saling mendengarkan saran, pendapat dan masukan oleh semua pihak dengan bermusyawarah.

Adapun saran yang diberikan yaitu agar kepala sekolah tetap konsisten dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan prosedur dan tersusun secara sistematis dengan menerapkan fungsi kepemimpinannya sebagai leader atau pengambil keputusan. Dan untuk guru agar dapat menaati dan memberikan ide dan gagasannya dalam berkontribusi merumuskan kebijakan serta mengimplementasi kebijakan dengan sebaik-baiknya. Untuk seluruh warga sekolah turut mengaplikasikan kebijakan dan selalu memperbaiki diri agar kebijakan dapat terimplementasi dengan baik.

REFERENSI

- Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, Aplikasi, Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, Jakarta: Rineka Cipta 2008
- Bakry, Aminuddin. 2010. "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik." *Jurnal MEDTEK*, Volume.2, Nomor 1 April_2010. Jakarta.
- Helmawati, *Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah /Madrasah Melalui Managerial Skills*. Jakarta: Reneka Cipta, 2014.
- Ace Suryadi, H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Jakarta, 1994.
- Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Yuni Indah. *Kebijakan Sertifikasi, Kinerja, dan Kesejahteraan Guru*. Yogyakarta: Deepublish 2016.